

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pelaku pengelolaan Keuangan Daerah memiliki peran dalam peningkatan PAD namun hanya sebatas bersifat dukungan dan bentuknya melalui koordinasi kerjasama dengan UPT dan OPD dan yang melakukan pelaksanaan secara langsung. Dan dalam meningkatkan PAD pada tahun 2017 ke 2018 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 140.292.468.784,29 dari 5 tahun sebelumnya. Dalam upaya peningkatan PAD, BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat beberapa kebijakan yaitu dengan melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, membuka website pelayanan. Adapun upaya BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan beberapa tindakan untuk meningkatkan PAD dengan cara pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibangun Samsat Corner pada Mall Bangka Trade Centre (BTC) bertempat di Lantai 3, mengoperasikan 4 (empat) unit kendaraan Samsat Keliling untuk daerah operasional Pulau Bangka 2 (dua) unit dan daerah operasional Pulau Belitung 2 sebanyak (dua) unit dan pengoptimalan pembentukan

7 Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPBT), dan membuat *e-samsat* Nasional.

Upaya BAKUDA untuk meningkatkan PAD dengan menekankan pada sumber penerimaan pajak dan retribusi yang prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan pelayanan perpajakan, dan pemberdayaan kekayaan milik daerah melalui peningkatan kualitas aparatur atau SDM dan juga sarana dan prasarana, serta merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dalam melakukan upaya peningkatan PAD, BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah.

2. Faktor yang menghambat peningkatan PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

a. Kondisi Awal Suatu Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi baru terbentuk pada tahun 2000, yang semula merupakan bagian provinsi dari Sumatera Selatan sejak tahun 2000 Bangka Belitung memisahkan diri dari Sumatera Selatan dan mulai secara mandiri mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri dengan menerapkan asas desentralisasi. Hal ini mengakibatkan mempengaruhi Peningkatan PAD di Bangka Belitung sehingga

kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam belum tereksploitasi dengan baik.

b. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Stabilnya PBRD Bangka Belitung mempengaruhi peningkatan PAD jika semakin meningkat PBRD di Bangka Belitung maka akan semakin meningkat pula jumlah Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD.

c. Pertumbuhan penduduk

Besarnya pendapatan dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Dengan semakin banyak jumlah penduduk maka semakin meningkat pula PAD namun pada fakta dilapangnya rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban selaku objek pendapatan daerah mempengaruhi pemasukkan pendapatan daerah. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk namun tidak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya maka akan berdampak terhadap peningkatan PAD.

d. Tingkat Inflasi

Inflasi pada desember 2018, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat mengalami inflasi yang terkendali sebesar 3,18 % (yoy) atau secara bulanan sebesar 151% (mtm). Dengan pencapaian tersebut, inflasi Bangka Belitung telah memenuhi target pencapaian inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 2,5% hingga 4,5% (yoy). Dengan adanya peningkatan inflasi

mempengaruhi peningkatan PAD karena semakin tinggi inflasi maka semakin berdampak buruk terhadap pendapatan daerah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
2. BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat beberapa kebijakan yaitu dengan melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan kerjasama dengan lingkup yang lebih luas dengan pihak pemerintahan dan swasta.